



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 21 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN
RENCANA BISNIS ANGGARAN DAN DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SAWERIGADING PALOPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Palopo tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis Anggaran Dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 24, tambahan lembaran Negara Nomor 4186);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING PALOPO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi;
3. Walikota adalah Walikota Palopo;
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo;

7. **Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palopo yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;**
8. **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Palopo yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;**
9. **Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur Utama RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo;**
10. **Pejabat pengelola BLUD RSUD adalah pimpinan BLUD RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD;**
11. **Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.**
12. **Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali;**
13. **Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD;**
14. **Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD RSUD;**
15. **Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;**
16. **Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD;**
17. **Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dasar penyusunan APBD;**
18. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;**

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD RSUD.

BAB II

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Penyusunan

Pasal 2

- (1) BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) BLUD RSUD menyusun RBA tahunan dengan mengacu pada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat :
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. baran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu persentase ambang batas tertentu, dan merupakan refleksi program dan kegiatan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo lainnya.
- (6) Kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari :
 - a. pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;

- c. hasil kerja sama BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
 - d. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.
- (7) Perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan standar biaya BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo yang ditetapkan oleh Walikota.
 - (8) Perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya paling kurang menyajikan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung.
 - (9) Dalam hal BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo belum menyusun standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo menggunakan standar biaya umum Pemerintah Kota yang ditetapkan oleh Walikota.
 - (10) Dalam hal BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

Pasal 3

- (1) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) hanya berlaku untuk biaya BLUD RSUD sawerigading Kota Palopo yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (2) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tercantum dalam RBA dan DPA-BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo.
- (3) Pencantuman ambang batas dalam RBA dan DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (4) Penyusunan RBA dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Pengajuan

Pasal 4

- (1) Direktur Utama RSUD menyampaikan RBA kepada PPKD, dan oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (2) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Pagu Anggaran BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo dan surplus anggaran BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu *output*, dan jenis belanja.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 5

- (1) TAPD sesuai dengan kewenangannya melakukan kajian atau telaah terhadap RBA sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- (2) Telaah RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama mencakup standar biaya dan anggaran BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo, kinerja keuangan BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo serta besaran persentase ambang batas.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipersamakan sebagai RKA-SKPD dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo.
- (5) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pembahasan bersama antara TAPD dengan Pejabat yang berwenang pada BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo.
- (6) Hasil kajian atas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar RKA-SKPD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- (7) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Direktur Utama RSUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.

BAB III

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Penyusunan

Pasal 6

- (1) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) digunakan sebagai acuan dalam menyusun DPA-BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo.
- (2) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas serta jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, rencana penarikan dana yang bersumber dari APBD, serta besaran persentase ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif.
- (3) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo kepada PPKD.

- (4) PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (5) Pengesahan DPA-BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) PPKD sesuai dengan kewenangannya, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo, paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran.

Bagian Kedua

Penarikan dan Penggunaan Dana

Pasal 7

- (1) DPA-BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo, selaku pengguna anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada PPKD sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 8

- (1) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah tidak terikat, dan hasil kerja sama BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja RSUD sesuai dengan DPA-BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo.
- (2) Hibah yang terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), setiap triwulan BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo membuat surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja (SP3B) dan disampaikan kepada PPKD dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) disertai laporan penerimaan pendapatan dan laporan pengeluaran biaya yang ditandatangani oleh pimpinan BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo.
- (2) Berdasarkan SP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan surat pengesahan pendapatan dan belanja (SP2B) sebagai dasar realisasi penggunaan dana BLUD RSUD yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Pengeluaran biaya BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo diberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan DPA-BLUD dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo yang dapat melampaui/bertambah dari pagu anggaran dalam DPA-BLUD yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo yang sah yang disesuaikan dan signifikan dengan realisasi pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Apabila rencana biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah melebihi pagu anggaran dan realisasi biaya BLUD RSUD masih dibawah pagu anggaran ditambah dengan besaran nilai dari persentase ambang batas, maka BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo dapat melaksanakan belanja dengan melaporkan kepada PPKD.
- (4) Apabila pagu anggaran ditambah dengan besaran nilai dari persentase ambang batas melebihi dari persentase ambang batas wajib mendapatkan persetujuan dari Walikota terlebih dahulu dan dituangkan dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

PERUBAHAN / REVISI

Pasal 11

- (1) Perubahan/revisi RBA definitif dan DPA-BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo dilakukan apabila :
 - a. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran yang berasal dari APBD; dan/atau
 - b. belanja BLUD RSUD melampaui ambang batas fleksibilitas.
- (2) Perubahan/revisi uraian rencana anggaran belanja pada RBA dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran biaya pada rencana anggaran biaya kegiatan pelayanan dan/atau biaya kegiatan pendukung pelayanan;
 - b. keadaan darurat; dan/atau
 - c. keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan uraian rencana anggaran belanja pada RBA dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah anggaran pada jenis belanja dalam DPA-BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo yang sudah ditetapkan;

- (4) Pejabat teknis kegiatan melalui pejabat keuangan mengusulkan perubahan uraian rencana anggaran biaya pada RBA kepada Pemimpin BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo;
- (5) Pergeseran anggaran pada uraian rencana anggaran belanja pada RBA dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo;
- (6) Perubahan rencana anggaran belanja pada RBA antara jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disusun oleh BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo disampaikan kepada PPKD untuk dianggarkan dalam perubahan APBD;
- (7) Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang terdapat dalam DPA-BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP




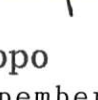
Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama RSUD Sawerigading Palopo.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PALAP	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. DIRUT RSUD		
3. Kabag HUKUM		
4. Kasubag DOK & PENY HUKUM		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 28 Nopember 2016

WALIKOTA PALOPO,


H. M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 28 Nopember 2016

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA
PALOPO,**


H. JAMALUDDIN

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 21... TAHUN 2016
TANGGAL 28... NOPEMBER 2016

1. HALAMAN SAMPUL

PEMERINTAH KOTA PALOPO

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING PALOPO

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN¹

Keterangan :

¹ diisi, tahun anggaran berjalan

2. LEMBAR PERSETUJUAN

DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING PALOPO

Menyetujui,
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN¹

- | | | | |
|----|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. | <i>(nama lengkap)</i> | Ketua | <i>(tanda tangan)</i> |
| 2. | <i>(nama lengkap)</i> | Sekretaris
Bukan
Anggota | <i>(tanda tangan)</i> |
| 3. | <i>(nama lengkap)</i> | Anggota | <i>(tanda tangan)</i> |
| 4. | <i>(nama lengkap)</i> | Anggota | <i>(tanda tangan)</i> |
| 5. | <i>(nama lengkap)</i> | Anggota | <i>(tanda tangan)</i> |
| 6. | <i>(nama lengkap)</i> | Anggota | <i>(tanda tangan)</i> |

Keterangan :

¹ diisi, tahun anggaran berjalan

3. LEMBAR PENGESAHAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING PALOPO

LEMBAR PENGESAHAN,

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN¹

Palopo, 20....²

Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo

Rumah Sakit Umum Daerah
Sawerigading Kota Palopo

Kepala Dinas
PPKAD Kota Palopo

Direktur Utama
BLUD RSUD Sawerigading Palopo

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.³

(nama lengkap)
NIP.³

Keterangan :

¹ diisi, tahun anggaran jalan

² diisi, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan tanggung jawab

³ diisi Nomor Induk Pegawai

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
KATA PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	
B. Visi Rumah Sakit	
C. Misi Rumah Sakit	
D. Maksud dan Tujuan	
E. Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit	
F. Kegiatan Rumah Sakit	
G. Budaya Organisasi	
H. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas	
BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN¹	
A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja	
1. Faktor Internal	
2. Faktor Eksternal	
B. Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran dengan Fakta yang Terjadi	
1. Aspek Makro	
2. Aspek Mikro	
C. Pencapaian Kinerja	
1. Non Keuangan	
2. Keuangan ²	
a. Realisasi Pendapatan	
b. Realisasi Biaya	
c. Realisasi Investasi	
d. Realisasi Pendanaan	
D. Prognosa Laporan Keuangan	
1. Neraca	
2. Laporan Operasional	
3. Laporan Arus Kas	
4. Catatan atas Laporan Keuangan	
BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN	
TAHUN ANGGARAN 20....³	
A. Kondisi Lingkungan BLUD Mempengaruhi	
1. Faktor Internal	
2. Faktor Eksternal	
B. Asumsi yang Digunakan	
1. Aspek Makro	
2. Aspek Mikro	
C. Sasaran, Indikator, Target Kinerja, dan Kegiatan Pelayanan	
D. Program Kerja dan Kegiatan	
1. Program Kerja	

2. Kegiatan	
E. Perkiraan Pendapatan	
F. Perkiraan Biaya	
1. Uraian Biaya	
2. Total Biaya	
G. Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Investasi	
1. Penerimaan Investasi	
2. Pengeluaran Investasi	
H. Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan	
1. Penerimaan Pendanaan	
2. Pengeluaran Pendanaan	
I. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	
1. Anggaran Pendapatan (Basis Akrual)	
2. Anggaran Biaya (Basis Akrual)	
3. Anggaran Biaya Berdasarkan Jenis Belanja Tahun ³	
4. Anggaran Pendapatan (Basis Kas)	
5. Anggaran Belanja (Basis Kas)	
6. Anggaran Belanja Berdasarkan Jenis Belanja Tahun ³	
7. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Investasi	
8. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan	
J. Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran	
BAB IV PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN ³	
A. Proyeksi Neraca	
B. Proyeksi Laporan Operasional	
C. Proyeksi Laporan Arus Kas	
D. Catatan atas Proyeksi Laporan Keuangan	
BAB V PENUTUP	
A. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian dalam Rangka Melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah	
B. Kesimpulan	
LAMPIRAN	
Ringkasan Pendapatan dan Belanja BLUD :	
1. Rencana Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja per Program dan Kegiatan RSUD	
2. Rencana Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja per Jenis Belanja	
3. Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD	
4. Rencana Anggaran Pendapatan BLUD	
5. Rencana Anggaran Belanja BLUD	
6. Rincian Rencana Anggaran Belanja BLUD	

Keterangan :

- ¹ diisi. tahun anggaran sebelumnya
² menyangkut masalah realisasi anggaran BLUD
³ diisi. tahun anggaran berjalan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

.....
.....
.....

B. Visi Rumah Sakit

.....
.....
.....

C. Misi Rumah Sakit

.....
.....
.....

D. Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit

.....
.....
.....

E. Kegiatan Rumah Sakit

.....
.....
.....

F. Budaya Organisasi

.....
.....
.....

G. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

.....
.....
.....

BAB II
KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN¹

A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

1. Faktor Internal

a. Pelayanan Medis

1) Kekuatan

.....
.....

2) Kelemahan

.....
.....

b. Organisasi dan SDM

1) Kekuatan

.....
.....

2) Kelemahan

.....
.....

c. Keuangan

1) Kekuatan

.....
.....

2) Kelemahan

.....
.....

d. Sarana dan Prasarana

1) Kekuatan

.....
.....

2) Kelemahan

.....
.....

2. Faktor Eksternal

a. Peluang (opportunity)

.....
.....

b. Ancaman (threat)

.....
.....

B. Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran dengan Fakta Yang Terjadi.

1. Aspek Makro

No	Unsur	Asumsi TA. ¹	Fakta TA. ¹	Ket
1	Pertumbuhan ekonomi (%)			
2	Tingkat inflasi (%)			
3	Pertumbuhan pasar (%)			
4	Tingkat suku bunga (%)			
5	Kurs (%)			
6	Dst			

Catatan : Uraian di atas dapat mengacu pada indikator ekonomi setempat
Uraian :

.....
.....

2. Apek Mikro

No	Unsur	Asumsi TA. ¹	Fakta TA. ¹	Ket
1	Pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi <i>Public Service Obligation (PSO)</i>			
2	Perubahan tarif layanan			
3	Pengembangan / peningkatan layanan			
4	Asumsi berkaitan dengan analisis rasio keuangan			
5	Dst			

Uraian :

.....
.....

C. Pencapaian Kinerja

1. Non Keuangan

No	Jenis Layanan	Satuan	Kerja Pelayanan TA. ¹			Pen capaian (%)
			Target Kinerja	Realisasi s.d 30 Juni	Prognosa s.d 31 Desember	
1	2	3	4	5	6	7=6/4
1					
2					
3	Dst					
Jumlah						

Uraian :

.....
.....

2. Keuangan

a) Realisasi Pendapatan

No	Unit Layanan	Pendapatan TA. ¹			Pen capai an (%)
		Target (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni	Prognosa s.d 31 Desember	
1	2	3	4	5	6=5/3
1				
2				
3	dst.....				
Jumlah					

Uraian :

.....

b) Realisasi Biaya

Komponen Biaya	Biaya TA. ¹			Pen capai an (%)
	Anggaran	Realisasi s/d 30 Juni	Prognosa s/d 31 Desember	
1	2	3	4	5=4/2
I. Biaya Operasional				
A. Biaya Pelayanan				
1. Biaya pegawai				
2. Biaya bahan				
3. Biaya jasa pelayanan				
4. Biaya pemeliharaan				
5. Biaya barang dan jasa				
6. Biaya pelayanan lainnya				
B. Biaya Umum dan Administrasi				
1. Biaya pegawai				
2. Biaya administrasi kantor				
3. Biaya pemeliharaan				
4. Biaya barang dan jasa				
5. Biaya promosi				
6. Biaya depresiasi				
7. Biaya umum dan administrasi lainnya				
II. Biaya Non Operasional				
1. Biaya bunga				
2. Biaya administrasi bank				
3. Kerugian penjualan aset				
4. Kerugian penurunan nilai				
5. Biaya non operasional lainnya				
Jumlah Biaya (I + II)				

Uraian :

.....

c) Realisasi Investasi
 1) Penerimaan Investasi

No	Jenis Investasi	Penerimaan Investasi TA. ¹		Pen capai an (%)
		Anggaran	Realisasi s.d ²	
1	2	3	4	5=4/3
1	Pelepasan aset			
a	Kendaraan			
b	Mesin			
c	Dst			
2	Pencairan invesrasi			
a	Pencairan deposito			
b	Penjualan surat berharga			
c	Dst			
	Jumlah			

Uraian :

.....

2) Pengeluaran Investasi

No	Jenis Investasi	Sumber Dana, Anggaran, dan Realisasi Tahun ¹														Pen capai an (%)	
		Jasa layanan		Hibah		Kerjasama		APBD		APBN		Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah		Jum lah			
		Angga ran	Realisasi s/d ²	Angga ran	Realisasi s/d ²	Anggar an	Realisasi s/d ²	Angga ran	Realisasi s/d ²	Angga ran	Realisasi s/d ²	Angga ran	Realisasi s/d ²	Angga ran	Realisasi s/d ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Tanah																
2	Peralatan dan mesin																
3	Gedung dan bangunan																
4	Kendaraan																
5	Perlengkapan dan peralatan kantor																
6	Jalan, irigasi dan jaringan																
7	Aset sewa guna usaha																
8	Surat utang dan surat modal																
9	Deposito jangka waktu dari 12 bulan																
10	System Informasi																
11	Dst																
	Jumlah																

Uraian :

.....

d) Realisasi Pendanaan

1) Penerimaan Pendanaan

No	Jenis Pendanaan	Penerimaan Tahun ¹		
		Anggaran	Realisasi s.d ²	Pencapaian (%)
1	2	3	4	5=4/3
1	Penarikan Pinjaman dari			
2	Dst			
	Jumlah			

Uraian :

.....

2) Pengeluaran Pendanaan

No	Jenis Pendanaan	Pengeluaran Tahun ¹		
		Anggaran	Realisasi s.d ²	Pencapaian (%)
1	2	3	4	5=(4)/(3)
1	Pembayaran utang kepada			
2	Dst			
	Jumlah			

Uraian :

.....

D. Prognosa Laporan Keuangan

1. Neraca

NERACA
 Prognosa Per 31 Desember¹

Uraian	Tahun ¹			
	Anggaran Per 31 Desember	Realisasi Per 30 Juni	Prognosa Per 31 Desember	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 = 4-2
I. ASET				
A. Aset Lancar				
1. Kas dan setara kas				
2. Investasi jangka pendek				
3. Piutang usaha				
4. Piutang lain-lain				
5. Persediaan				
6. Uang muka				
7. Pendapatan yang harus diterima				
8. Dst				

Jumlah Aset Lancar				
B. Investasi Jangka Panjang				
C. Aset Tetap				
1. Tanah				
2. Gedung dan bangunan				
3. Peralatan dan mesin				
4. Kendaraan				
5. Perlengkapan dan peralatan kantor				
6. Jalan, irigasi, dan jaringan				
7. Dst				
Jumlah Aset Tetap				
Akumulasi penyusutan				
Nilai buku aset tetap				
D. Aset Lain-lain				
1. Aset tak berwujud				
2. Konstruksi dalam pengerjaan				
3. Dst				
Jumlah Aset Lain-lain				
Jumlah Aset (A+B+C+D)				
II. KEWAJIBAN				
A. Kewajiban Jangka Pendek				
1. Utang usaha				
2. Utang pajak				
3. Biaya yang masih harus dibayar				
4. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
5. Pendapatan yang diterima dimuka				
6. Dst				
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek				
B. Kewajiban Jangka Panjang				
1. Utang jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun				
2. Dst				
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang				
Jumlah Kewajiban (A+B)				
III. EKUITAS				
1. Ekuitas tidak terikat				
a. Ekuitas awal				
b. Surplus (Defesit) sampai dengan periode satu tahun				

lalu				
c. Surplus (Defisit) tahun berjalan				
2. Terikat permanen				
3. Terikat temporer				
4. Hibah				
5. Donasi				
6. Dst				
Jumlah Ekuitas				
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (II+III)				

Uraian :

.....

2. Laporan Operasional

LAPORAN OPERASIONAL Prognosa Periode Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember¹

Uraian	Tahun ¹			
	Anggaran	Realisasi s/d 30 Juni	Prognosa s/d 31 Desember	Selisih
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=4-2</i>
A. Pendapatan				
1. Jasa layanan				
2. Hibah				
3. Hasil kerjasama				
4. Pendapatan dari APBD				
5. Pendapatan dari APBN				
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
Jumlah Pendapatan (1+2+3+4+5+6)				
B. Biaya Operasional				
1. Biaya pelayanan				
2. Biaya umum dan administrasi				
Jumlah Biaya Operasional (1+2)				
Surplus (Defisit) setelah biaya operasional (A-B)				
C. Pendapatan Non Operasional				
D. Biaya Non Operasional				
Surplus (Defisit) sebelum pos keuntungan / kerugian				
Surplus (Defisit) sebelum pos-pos luar biasa				
1. Pendapatan dari kejadian luar biasa				
2. Biaya dari kejadian luar biasa				

Surplus (Defisit) bersih tahun ¹				
--	--	--	--	--

Uraian :

.....

3. Laporan Arus Kas

LAPORAN ARUS KAS
Prognosa Periode Tahun Yang Berakhir
Tanggal 31 Desember¹

Uraian	Tahun ¹			
	Anggaran	Realisasi s/d 30 Juni	Prognosa s/d 31 Desember	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 = 4-2
A. Arus Kas dari Aktivitas Operasional				
Arus Kas Masuk				
1. Jasa layanan				
2. Hibah				
3. Hasil kerjasama				
4. Pendapatan dari APBD				
5. Pendapatan dari APBN				
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
Arus Kas Keluar				
1. Biaya layanan				
2. Biaya umum dan administrasi				
3. Biaya lain-lain				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional				
B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
Arus Kas Masuk				
1. Hasil penjualan aset				
2. Hasil investasi				
3. Dst				
Arus Kas Keluar				
1. Perolehan aset				
2. Pembelian investasi				
3. Perolehan aset lainnya				
4. Dst				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi				
C. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				
Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan pinjaman dari				
2. Dst				
Arus Kas Keluar				
1. Pembayaran pinjaman				

kepada				
2. Dst				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan				
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih				
Kas dan Setara Kas Awal				
Kas dan Setara Kas Akhir				

4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Prognosa Periode Tahun Yang Berakhir
Tanggal 31 Desember¹

a. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Sebagai contoh untuk pos kas dan setara kas, dan piutang usaha.

1) Kas dan setara kas, terdiri dari :

Uraian	Realisasi s/d ²	Prognosa s/d 31 Desember ¹	Selisih (%)
1	3	4	$5=(4-2)/2$
Kas di bendahara penerimaan			
Giro Bank			
Tabungan Bank			
Deposito Bank			
Jumlah			

2) Piutang usaha, terdiri dari :

Uraian	Realisasi s/d	Prognosa s/d 31 Desember ¹	Selisih (%)
1	3	4	$5=(4-2)/2$
Piutang kepada			
Piutang kepada			
Jumlah			

3) Dst

b. Penjelasan Atas Informasi Lainnya

.....

Keterangan :

¹ diisi. tahun anggaran sebelumnya.

² diisi. data semester pertama / bulan terakhir.

BAB III
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN¹

A. Kondisi Lingkungan BLUD yang Mempengaruhi.

1. Faktor Internal

a. Kondisi Pelayanan

1) Kekuatan :

.....
.....

2) Kelemahan :

.....
.....

b. Kondisi keuangan

1) Kekuatan :

.....
.....

2) Kelemahan :

.....
.....

c. Kondisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1) Kekuatan :

.....
.....

2) Kelemahan :

.....
.....

d. Kondisi Sarana dan Prasarana

1) Kekuatan :

.....
.....

2) Kelemahan :

.....
.....

2. Faktor Eksternal

a. Peraturan perundang-undangan yang terkait

.....
.....

b. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi *public Service Obligation* (SPO)

.....
.....

c. Keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis.

.....
.....

d. Perkembangan social budaya dan tingkat pendidikan masyarakat

.....
.....

- e. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi
.....
.....
- f. Keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional
.....
.....

B. Asumsi yang digunakan

1. Aspek Makro

No	Indikator Ekonomi	Asumsi TA. ¹
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	
2	Tingkat Inflasi (%)	
3	Pertumbuhan pasar (%)	
4	Tingkat suku bunga pinjaman (%)	
5	Kurs (Rp)	
6	Dst	

Catatan :

Uraian di atas diisi dengan kondisi BLUD RSUD dan indikator ekonomi daerah setempat

2. Aspek Mikro

No	Uraian	Asumsi TA. ¹
1	Pembiayaan dari pemerintah daerah sebagai fungsi <i>Public Service Obligation (SPO)</i>	
2	Rencana rata-rata kenaikan tarif	
3	Rencana peningkatan pelayanan	
4	Dst	

Catatan :

Dijelaskan implikasi masing-masing asumsi terhadap rencana kinerja, dapat berupa presentase, satuan, pertumbuhan, kenaikan/penurunan.

C. Sasaran Indikator, Target Kinerja dan Kegiatan Pelayanan

No	Unit Layanan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan
1				
2				
3	Dst				

Contoh/Ilustrasi kegiatan pada BLUD Rumah Sakit

No	Unit Layanan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan
1	UGD	<i>Kemampuan penyelamatan jiwa</i>	Waktu tanggap pemeriksaan dokter (response time)	Maksimum 5 menit	Pelatihan, penambahan dokter yang telah terlatih
2	Rawat Inap	Meningkatnya mutu pelayanan	Pelayanan oleh dokter spesialis	100 %	Penambahan dokter spesialis dan alat medis yang memadai

D. Program Kerja dan Kegiatan

1. Program :

- a. Program
- b. Program
- c. Dst

2. Kegiatan :

- a. Kegiatan
- b. Kegiatan
- c. Dst

E. Perkiraan Pendapatan

No	Sumber Pendapatan	Prognosa Tahun ²	Proyeksi TA. ¹
1	2	3	4
1	Jasa Layanan		
2	Hibah		
3	Kerjasama		
4	APBD		
5	APBN		
6	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah		
	Jumlah		

Uraian :

.....

F. Perkiraan Biaya

1. Uraian Biaya

Komponen Biaya	Jumlah Anggaran
1	2
I. Biaya Operasional	
A. Biaya Pelayanan	
1. Biaya pegawai	
2. Biaya bahan	
3. Biaya jasa pelayanan	
4. Biaya pemeliharaan	
5. Biaya barang dan jasa	
6. Biaya pelayanan lainnya	
B. Biaya Umum dan Administrasi	
1. Biaya pegawai	
2. Biaya administrasi kantor	
3. Biaya pemeliharaan	
4. Biaya barang dan jasa	
5. Biaya promosi	
6. Biaya umum dan administrasi lainnya	
II. Biaya Non Operasional	
1. Biaya bunga	
2. Biaya administrasi bank	
3. Kerugian pelepasan aset tetap	

4. Kerugian penurunan nilai	
5. Biaya non operasional lainnya	
Jumlah Biaya (I+II)	

2. Total Biaya

No	Biaya	Jumlah Biaya
1	2	3
A	Biaya Operasional	
1	Biaya Pelayanan	
2	Biaya Umum dan Administrasi	
B	Biaya Non Operasional	
	Total	

G. Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Investasi

1. Penerimaan Investasi

No	Komponen Penerimaan Investasi	Prognosa Tahun ²	Proyeksi TA. ¹
1	2	3	4
	1. Pelepasan Aset		
	a. Kendaraan		
	b. Mesin		
	c. Dst		
	2. Pencairan Investasi		
	a. Pencairan deposito		
	b. Penjualan surat berharga		
	c. Dst		
	Jumlah		

Uraian :

.....

2. Pengeluaran Investasi

Komponen Pengeluaran Investasi	Rincian Pengeluaran			Jumlah Penge Luaran
	Jumlah	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5 = 2x4
1. Pembelian Tanah				
2. Pembelian peralatan dan mesin				
3. Pembangunan gedung dan bangunan				
4. Pembelian kendaraan				
5. Pembelian peralatan kantor				
6. Pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan				
7. Pembelian surat berharga jangka panjang				
8. Pembangunan/ pengembangan sistem informasi				
9. Pembangunan/ pengembangan sarana fisik lainnya				
Jumlah Pengeluaran Investasi				

Uraian :

.....

H. Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan

1. Penerimaan Pendanaan

No	Komponen Penerimaan Pendanaan	Prognosa Tahun ²	Proyeksi TA. ¹
1	2	3	4
1	Penarikan Pinjaman dari		
2	Dst		
Jumlah			

Uraian :

.....

2. Pengeluaran Pendanaan

Komponen Pengeluaran Pendanaan	Rincian Pengeluaran			Jumlah Pengeluaran
	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5
1. Pengeluaran pembayaran hutang				
a. Pokok				
b. Bunga dan administrasi				
c. Komisi, provisi, denda				
2. Dst				
.....				
Jumlah				

Uraian :

.....

I. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah

Anggaran BLUD merupakan penjabaran program dan kegiatan dalam satuan uang berdasarkan pendapatan, biaya, dan pengeluaran yang dananya bersumber dari seluruh pendapatan BLUD.

1. Anggaran Pendapatan (Basis Akrual)

No	Uraian	Prognosa TA ²	Anggaran TA ¹	Perkiraan Maju (Forward Estimate) TA ³	Kenaikan / Penurunan (%)
1	2	3	4	5	6 = (4-3)/3
1	Pendapatan jasa layanan				
2	Hibah				
3	Hasil kerjasama				
4	Pendapatan dari APBD				
5	Pendapatan dari APBN				
6	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah				
Jumlah					

2. Anggaran Biaya (Basis Akrual)

No	Komponen Biaya	Sumber Dana Tahun Anggaran ¹						Jumlah
		Jasa layanan	Hibah	Kerjasama	APBD	APBN	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	BIAYA OPERASIONAL							
A	Biaya Pelayanan							
1	Biaya pegawai							
2	Biaya bahan							
3	Biaya jasa pelayanan							
4	Biaya pemeliharaan							
5	Biaya barang dan jasa							
6	Biaya pelayanan lainnya							
B	Biaya Umum dan Administrasi							
1	Biaya pegawai							
2	Biaya administrasi kantor							
3	Biaya pemeliharaan							
4	Biaya barang dan jasa							
5	Biaya promosi							
6	Biaya umum dan administrasi lainnya							
II	BIAYA NON OPERASIONAL							
1	Biaya bunga							
2	Biaya administrasi bank							
3	Kerugian pelepasan aset tetap							
4	Kerugian penurunan nilai							
5	Biaya non operasional lainnya							
	Jumlah							

3. Anggaran Biaya Berdasarkan Jenis Belanja Tahun¹

No	Jenis Biaya	Jenis Belanja			Total Biaya
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6
I	BIAYA OPERASIONAL				
A	Biaya Pelayanan				
1	Biaya pegawai				
2	Biaya bahan				
3	Biaya jasa pelayanan				
4	Biaya pemeliharaan				
5	Biaya barang dan jasa				
6	Biaya pelayanan lainnya				
B	Biaya Umum dan Administrasi				
1	Biaya pegawai				
2	Biaya administrasi kantor				
3	Biaya pemeliharaan				
4	Biaya barang dan jasa				
5	Biaya promosi				
6	Biaya umum dan administrasi lainnya				
II	BIAYA NON OPERASIONAL				
1	Biaya bunga				
2	Biaya administrasi bank				
3	Kerugian pelepasan aset tetap				
4	Kerugian penurunan nilai				
5	Biaya non operasional lainnya				
	Jumlah				

4. Anggaran Pendapatan (Basis Kas)

No	Uraian	Prognosa TA. ²	Proyeksi TA. ¹	Perkiraan Maju (<i>forward Estimate</i>) TA. ³	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan jasa layanan				
2	Pendapatan hasil kerjasama				
3	Pendapatan hibah				
4	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
	Jumlah				

5. Anggaran Belanja (Basis Kas)

No	Komponen Biaya	Sumber Dana Tahun Anggaran ¹						Jumlah
		Jasa Layanan	Hibah	Kerjasama	APBD	APBN	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pembayaran kepada pegawai							
2	Pembayaran kepada pihak ketiga							
3	Pembayaran lain-lain							

6. Anggaran Belanja Berdasarkan Jenis Belanja Tahun¹

No	Jenis Biaya	Jenis Belanja			Total Biaya
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6
I	BIAYA OPERASIONAL				
A	Biaya Pelayanan				
1	Biaya pegawai				
2	Biaya bahan				
3	Biaya jasa pelayanan				
4	Biaya pemeliharaan				
5	Biaya barang dan jasa				
6	Biaya pelayanan lainnya				
B	Biaya Umum dan Administrasi				
1	Biaya pegawai				
2	Biaya administrasi kantor				
3	Biaya pemeliharaan				
4	Biaya barang dan jasa				
5	Biaya promosi				
6	Biaya umum dan administrasi lainnya				
II	BIAYA NON OPERASIONAL				
1	Biaya bunga				
2	Biaya administrasi bank				
3	Kerugian pelepasan aset tetap				
4	Kerugian penurunan nilai				
5	Biaya non operasional lainnya				
	Jumlah				

7. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Investasi

a. Anggaran Penerimaan Investasi (Basis Kas)

No	Uraian	Prognosa TA. ²	Proyeksi TA. ¹	Perkiraan Maju (<i>forward Estimate</i>) TA. ³	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pelepasan aset				
	a. Kendaraan				
	b. Mesin				
	c. Dst				
2	Pencairan investasi				
	a. Pencairan deposito				
	b. Penjualan surat berharga				
	c. Dst				

b. Anggaran Pengeluaran Investasi Berdasarkan Sumber Dana (Basis Kas)

No	Komponen Biaya	Sumber Dana Tahun Anggaran ¹						Jumlah
		Jasa Layanan	Hibah	Kerjasama	APBD	APBN	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perolehan tanah							
2	Perolehan peralatan dan mesin							
3	Perolehan gedung dan bangunan							
4	Perolehan kendaraan							
5	Perolehan perlengkapan dan peralatan kantor							
6	Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan							
7	Pengeluaran pembelian surat berharga jangka panjang							
8	Pengeluaran pembangunan/ pengembangan sistem informasi							
9	Pengeluaran pembangunan/ pengembangan sarana fisik lainnya							
Jumlah								

c. Anggaran Pengeluaran Investasi Berdasarkan Jenis Belanja dan Jenis Pembiayaan Tahun¹

No	Komponen Biaya	Jenis Belanja			Total Biaya
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6
1	Perolehan tanah				
2	Perolehan peralatan dan mesin				
3	Perolehan gedung dan bangunan				
4	Perolehan kendaraan				
5	Perolehan perlengkapan dan peralatan kantor				
6	Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan				
7	Pengeluaran pembelian surat berharga jangka panjang				
8	Pengeluaran pembangunan/ pengembangan sistem informasi				
9	Pengeluaran pembangunan/ pengembangan sarana fisik lainnya				
Jumlah					

8. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan

a. Penerimaan Pendanaan

No	Uraian	Prognosa TA. ²	Proyeksi TA. ¹	Perkiraan Maju (<i>forward Estimate</i>) TA. ³	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5	6
1	Penarikan pinjaman dari				
2	Dst				

b. Pengeluaran Pendanaan Berdasarkan Sumber Dana

No	Komponen Biaya	Sumber Dana Tahun Anggaran ¹						Jumlah
		Jasa Layanan	Hibah	Kerjasama	APBD	APBN	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pembayaran Pinjaman							
	a. Pokok							
	b. Bunga dan administrasi							
	c. Provisi, denda							
2	Dst							

c. Pengeluaran Pendanaan Berdasarkan Jenis Belanja dan Jenis Pembiayaan

No	Jenis Pengeluaran	Jenis Anggaran			Jenis Pembiayaan		Total Biaya
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembayaran Pinjaman						
	a. Pokok						
	b. Bunga dan administrasi						
	c. Komisi, provisi, denda						
2	Dst						
JUMLAH							

J. Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran

Belanja BLUD RSUD dapat bertambah (fleksibel) dari yang dianggarkan, disesuaikan dan signifikan dengan peningkatan pendapatan.

Besaran ambang batas dalam RBA ini adalah% dari biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD.

Untuk itu, apabila rencana biaya bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, Tahun Anggaran¹ diperkirakan = Rp..... (a) maka besaran ambang batas = % X Rp.(a) = Rp.(b)

Dengan demikian, apabila realisasi biaya BLUD RSUD diatas Rp.(a) dan masih dibawah (Rp.(a) + Rp.(b)) = Rp.(c) BLUD dapat melaksanakan belanja dengan melaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Sedangkan apabila melebihi Rp.(c) wajib mendapatkan persetujuan dari Walikota terlebih dahulu dan dituangkan dalam bentuk peraturan Walikota.

Keterangan :

¹ diisi. tahun anggaran berjalan.

² diisi. tahun anggaran sebelumnya.

³ diisi. tahun anggaran berjalan + 1 tahun.

BAB IV
PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN¹

A. Proyeksi Neraca

NERACA
PROYEKSI PER 31 DESEMBER¹

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Prognosa per 31 Desember TA ²	Proyeksi per 31 Desember ¹	Perubahan	
			Jmlah (Rp)	%
1	2	3	4	5=4/2
I. ASET				
A. Aset Lancar				
1. Kas dan setara kas				
2. Investasi jangka pendek				
3. Piutang usaha				
4. Piutang lain-lain				
5. Persediaan				
6. Uang muka				
7. Pendatana yang masih harus diterima				
8. Dst				
Jumlah Aset Lancar				
B. Investasi Jangka Panjang				
C. Aset Tetap				
1. Tanah				
2. Peralatan dan mesin				
3. Gedung dan bangunan				
4. Kendaraan				
5. Perlengkapan dan peralatan kantor				
6. Jalan, irigasi, dan jaringan				
7. Dst				
Jumlah Aset Tetap				
Akumulasi Penyusutan				
Nilai Buku Aset Tetap				
D. Aset Lain-lain				
1. Aset tak berwujud				
2. Konstruksi dalam pengerjaan				
3. Dst				
Jumlah Aset Lain-lain				
Jumlah Aset (A+B+C+D)				
II. KEWAJIBAN				
A. Kewajiban Jangka Pendek				
7. Utang usaha				
8. Utang pajak				
9. Biaya yang masih				

harus dibayar				
10. Utang jangka panjang				
11. Pendapatan yang diterima dimuka				
12. Dst				
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek				
B. Kewajiban Jangka Panjang				
3. Utang jangka panjang				
4. Dst				
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang				
Jumlah Kewajiban (A+B)				
III. EKUITAS				
7. Ekuitas tidak terikat				
d. Ekuitas awal				
e. Surplus (Defesit) s.d periode tahun lalu				
f. Surplus (Defesit) tahun berjalan				
8. Terikat permanen				
9. Terikat temporer				
10. Hibah				
11. Donasi				
12. Dst				
Jumlah Ekuitas				
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (II+III)				

B. Proyeksi Laporan Operasional

LAPORAN OPERASIONAL
PROYEKSI TAHUN ANGGARAN¹

(dalam ribuan rupiah)

Komponen	Prognosa TA. ²	Proyeksi TA. ¹	Perubahan	
			Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5=4/2
E. Pendapatan				
7. Jasa layanan				
8. Hibah				
9. Hasil kerjasama				
10. Pendapatan dari APBD				
11. Pendapatan dari APBN				
12. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
Jumlah Pendapatan (1+2+3+4+5+6)				
F. Biaya Operasional				
3. Biaya pelayanan				

4. Biaya umum dan administrasi				
Jumlah Biaya Operasional (1+2)				
Surplus (Defisit) setelah biaya operasional (A-B)				
G. Pendapatan Non Operasional				
H. Biaya Non Operasional				
Surplus (Defisit) sebelum pos keuntungan / kerugian				
Surplus (Defisit) sebelum pos-pos luar biasa				
4. Pendapatan dari kejadian luar biasa				
5. Biaya dari kejadian luar biasa				
Surplus (Defisit) bersih tahun 2016				

C. Proyeksi Laporan Arus Kas

LAPORAN ARUS KAS PROYEKSI TAHUN¹

(dalam ribuan rupiah)

Komponen	Prognosa TA. ²	Proyeksi TA. ¹	Perubahan	
			Jmlah (Rp)	%
1	2	3	4	5=4/2
A. Arus Kas dari Aktivitas Operasional				
1. Surplus (Defisit) tahun berjalan				
2. Penyesuaian ke dasar kas				
a. Biaya penyusutan dan amortisasi				
b. Kerugian penurunan nilai				
c. Biaya bunga				
d. Dst				
3. Perubahan aset lancar				
a. Investasi jangka pendek				
b. Piutang usaha				
c. Piutang lain-lain				
d. Persediaan				
e. Uang muka				
f. Pendapatan yang masih harus diterima				
4. Perubahan kewajiban jangka pendek				

a. Utang usaha				
b. Utang pajak				
c. Biaya yang masih harus dibayar				
d. Utang jangka panjang yang jatuh dalam satu tahun				
e. Pendapatan yang diterima di muka				
f. Utang jangka pendek lainnya				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional				
B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
Arus Kas Masuk				
1. Hasil penjualan aset tidak lancar				
2. Hasil investasi				
3. Dst				
Arus Kas Keluar				
1. Perolehan aset tetap				
2. Pembelian investasi				
3. Perolehan aset lainnya				
4. Dst				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi				
C. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				
Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan pinjaman				
2. Dst				
Arus Kas Keluar				
1. Pembayaran pinjaman				
2. Dst				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan				
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih				
Kas dan Setara Kas Awal				
Kas dan Setara Kas Akhir				

D. Catatan atas Proyeksi Laporan Keuangan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. Penjelasan Atas Informasi-informasi Keuangan

1) Kas dan Setara Kas, terdiri dari :

Uraian	Prognosa Per 31 Desember TA. ²	Proyeksi Per 31 Desember TA. ¹
1	2	3
Kas di bendahara penerimaan		
Kas di bendahara pengeluaran		
Giro Bank		
Giro Bank		
Tabungan Bank		
Tabungan Bank		
Deposito Bank		
Deposito Bank		
Jumlah		

2) Piutang Usaha, terdiri dari :

Uraian	Prognosa Per 31 Desember TA. ²	Proyeksi Per 31 Desember TA. ¹
1	2	3
Piutang kepada		
Piutang kepada		
Jumlah		

3) Dst

b. Penjelasan Atas Informasi Lainnya

.....

Keterangan :

¹ diisi, tahun anggaran berjalan

² diisi, tahun anggaran sebelumnya

BAB V
PENUTUP

A. Hal-hal Yang Perlu mendapat Perhatian dalam Implementasi Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah

.....
.....
.....
.....
.....
.....

B. Kesimpulan

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Palopo, 20....¹

Direktur Utama
BLUD RSUD Sawerigading Palopo

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.²

Keterangan :

¹ diisi, tahun anggaran jalan

² diisi, Nomor Induk Pegawai

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PALOPO
 NOMOR TAHUN 2016
 TANGGAL NOPEMBER 2016

a. Format DPA-BLUD untuk Ringkasan Anggaran Pendapatan, Biaya, Pengeluaran Investasi, dan Pengeluaran Pendanaan.

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD RSUD SAWERIGADING PALOPO		DPA-BLUD
TAHUN ANGGARAN ¹		
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BIAYA, PENGELUARAN INVESTASI DAN PENGELUARAN PENDANAAN		
No	Uraian	Jumlah
1	2	3
A	Pendapatan BLUD	
1	Jasa Layanan	
2	Hibah	
3	Hasil Kerjasama dengan pihak lain	
4	APBD	
5	APBN	
6	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	
	JUMLAH	
B	Biaya BLUD	
1	Biaya Operasional	
2	Biaya Non Operasional	
	JUMLAH	
C	Pengeluaran Investasi	
D	Pengeluaran Pendanaan	
	Surplus (Defisit) $\{(A-(B+C+D))\}$	

Palopo, 20....¹

Mengesahkan,
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
 Kota Palopo,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.²

Catatan:

Pendapatan, Biaya dan Pengeluaran menggunakan basis kas.

b. Format DPA-BLUD untuk Anggaran Pendapatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD RSUD SAWERIGADING PALOPO		DPA-BLUD	
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN ¹			
No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pendapatan jasa layanan		
	a.		
	b.		
	c. Dst		
2.	Hibah		
	a.		
	b.		
	c. Dst		
3.	Hasil kerjasama		
	a.		
	b.		
	c. Dst.....		
4.	Pendapatan dari APBD		
	a. Operasional		
	b. Investasi		
	c. Dst		
5.	Pendapatan dari APBN		
	a. Operasional		
	b. Investasi		
	c. Dst		
6.	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah		
	a. Keuntungan penjualan aset		
	b. Hasil pemanfaatan kekayaan		
	c. jasa giro.		
	d. pendapatan bunga.		
	e. deviden		
	f. Dst		
	Jumlah Pendapatan		

Palopo, 20....¹

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kota Palopo,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.²

c. Format DPA-BLUD untuk Anggaran Biaya

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD RSUD SAWERIGADING PALOPO		DPA-BLUD
ANGGARAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN.....		
NO	ALOKASI BIAYA	JUMLAH
1	2	3
I.	BIAYA OPERASIONAL	
A	Biaya Pelayanan	
	1. Biaya pegawai	
	2. Biaya bahan	
	3. Biaya jasa pelayanan	
	4. Biaya pemeliharaan	
	5. Biaya barang dan jasa	
	6. Biaya pelayanan lainnya	
	Jumlah	
B	Biaya Umum Dan Administrasi	
	1. Biaya pegawai	
	2. Biaya administrasi kantor	
	3. Biaya pemeliharaan	
	4. Biaya barang dan jasa	
	5. Biaya promosi	
	6. Biaya umum dan administrasi lainnya	
	Jumlah	
II.	BIAYA NON OPERASIONAL	
	1. Biaya bunga	
	2. Biaya administrasi bank	
	3. Kerugian pelepasan aset tetap	
	4. Kerugian penurunan nilai	
	5. Biaya non operasional lainnya	
	Jumlah	
III.	AMBANG BATAS =% dari belanja yang berasal dari pendapatan jasa layanan BLUD RSUD	
	Jumlah (I+II+III)	

Palopo, 20....¹

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kota Palopo,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.²

Keterangan :

¹ diisi, tahun anggaran berjalan

² diisi, Nomor Induk Pegawai

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR TAHUN 2016
TANGGAL NOPEMBER 2016

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD RSUD Triwulan
Tahun sebesar Rp. (.....), yang
berasal dari pendapatan : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan
Pendapatan lain-lain yang sah, adalah tanggung jawab kami.

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka
pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang
berlaku pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan
pengesahan pengeluaran biaya BLUD RSUD Sawerigading Palopo.

Palopo, 20....¹

Direktur Utama
BLUD RSUD Sawerigading Palopo

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.³

**LAPORAN PENDAPATAN
BLUD - RSUD SAWERGADING PALOPO
TRIWULAN² TAHUN ...¹**

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN <i>LALU</i>	REALISASI TRIWULAN <i>INI</i>	REALISASI S/D TRIWULAN <i>INI</i>	LEBIH (KURANG)
A.	Pendapatan BLUD					
1	Jasa Layanan					
2	Hibah					
3	Hasil Kerjasama					
4	Pendapatan Lain yang Sah					
	Jumlah					

Palopo, 20....¹

Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
Kota Palopo,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.³

Direktur Utama
BLUD RSUD Sawerigading Palopo

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.³

LAPORAN PENGELUARAN BIAYA
BLUD - RSUD SAWERGADING PALOPO
TRIWULAN² TAHUN¹

No	Uraian	Anggaran Dalam DPA	Realisasi s/d Triwulan <i>Lalu</i>	Realisasi Triwulan <i>Ini</i>	Realisasi s/d Triwulan <i>Ini</i>	Lebih (Kurang)
A.	BIAYA OPERASIONAL					
	1. Biaya Pelayanan					
	a. Biaya pegawai					
	b. Biaya bahan					
	c. Biaya jasa pelayanan					
	d. Biaya pemeliharaan					
	e. Biaya barang dan jasa					
	f. Biaya pelayanan lain-lain					
	2. Biaya Umum & Administrasi					
	a. Biaya Pegawai					
	b. Biaya administrasi kantor					
	c. Biaya pemeliharaan					
	d. Biaya barang dan jasa					
	e. Biaya promosi					
	f. Biaya umum & adm. lain-lain					
B.	BIAYA NON PERASIONAL					
	a. Biaya Bunga					
	b. Biaya administrasi bank					
	c. Biaya kerugian penjualan aset tetap					
	d. Biaya kerugian penurunan nilai					
	e. Biaya non operasional lain-lain					
C.	BIAYA PENGELUARAN INVESTASI					
	a. Pengadaan Tanah					
	b. Pengadaan Konruksi/Pembelian Bangunan					

	c. Pengadaan untuk Peralatan dan Mesin					
	d. Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan					
	e. Pengeluaran untuk Fisik Lainnya					
JUMLAH						

Palopo, 20....¹

Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
Kota Palopo,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

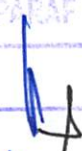



NIP.³

Direktur Utama
BLUD RSUD Sawerigading Palopo

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.³

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. DIRUT RSUD		
3. Kabag HUKUM		
4. Kasubag DOK & PENY HUKUM		

WALIKOTA PALOPO,


H.M. JUDAS AMIR

Keterangan :

¹ diisi, tahun anggaran berjalan

² diisi, triwulan berjalan

³ Nomor Induk Pegawai